Hukum Acara Perdata.

Sita jaminan dapat diminta sepanjang persidangan.

P U T U S A N

Reg. No. 371 K/Pdt/1984.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. Tati Suhartati, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Barat Rt.012/Rw.02, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: HJC. Princen, beralamat di Jalan Menteng Kecil No.10 Jakarta Pusat.

pemohon kasasi dahulu tergugat I -- p e m b a n d i n g ;

m e l a w a n

Pandapotan Hutajulu, bertempat tinggal di Komplek Anggaran Jalan Duren Tiga No.59, Jakarta Selatan, termohon kasasi dahulu penggugat -- t e r b a n d i n g ;

d a n

Moch. Sarwani Nur, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Barat Rt.012/Rw.02, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, turut termohon kasasi dahulu tergugat II -- p e m b a n d i n g ;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan,

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi dan turut termohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas *dalil-dalil*:

bahwa pada tahun 1980 tergugat-asli I dan II telah menjual kepada penggugat asli sebidang tanah yang mereka akui sebagai miliknya yang perincian tentang luas, nomor persil, nomor kohir dan letaknya seperti

tersebut dalam surat gugatan berikut sebuah bangunan rumah yang ada di atasnya seharga Rp. 2.000.000,-- (dua juta rupiah), tapi walaupun penggugat asli telah membayar lunas harganya, tergugat-tergugat asli belum mau menyerahkan tanah dan bangunan rumah tersebut dan karena keengganan itu penggugat asli telah melaporkannya kepada yang berwajib, namun tergugat-tergugat asli tetap membangkang untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah tersebut malah tergugat asli II memberikan laporan kepada POM ABRI yang seakan-akan untuk pengosongan tersebut, penggugat asli telah memperalat ABRI, hal mana tidak berdasar sama sekali

bahwa karena ulah tergugat-tergugat asli tersebut, maka penggugat asli telah menderita kerugian yang penggugat asli berhak menuntutnya dari tergugat-tergugat asli, kerugian mana seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,-- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan perincian tentang jenis kerugian tersebut adalah seperti tersebut dalam surat gugatan;

bahwa penggugat asli mohon sita jaminan atas harta kekayaan tergugat-tergugat asli karena ada kekhawatiran tergugat-tergugat asli enggan untuk memberikan ganti rugi kepada penggugat asli;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Memerintahkan para tergugat agar segera mengosongkan tanah dan bangunan rumah yang masih didudukinya, selanjutnya diserahkan kepada penggugat, supaya tidak dialihkan, disewakan kepada pihak ketiga, sampai adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde),
2. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) dengan seketika dan secara tunai kepada penggugat sebesar Rp. 50.000,-- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila putusan provisionil ini dilanggar;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah ingkar janji;
3. Menyatakan para tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan penggugat sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas

sebidang tanah seluas 200 M² diatas persil No.104a, Nomor Kohir C. 303 blok D.III yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berikut bangunan rumah tinggal yang ada diatasnya;

5. Memerintahkan para tergugat segera melaksanakan isi Akte Jual Beli No.557/I.7/11.1/1980 tertanggal 26 Maret 1980 yang dibuat Camat Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yaitu dengan menyerahkan kepada penggugat sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dalam keadaan kosong dan bebas dari beban-beban yang ada diatasnya;

6. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat uang sejumlah Rp. 1.500.000,— (satu juta lima ratus ribu rupiah),

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebuah kendaraan Jeep No. Pol. B-1073-AF miliknya para tergugat;

8. Memerintahkan para tergugat agar melaksanakan putusan perkara ini selambat-lambatnya dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak putusan mengenai perkara ini dibacakan;

9. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini

10. Menetapkan putusan mengenai perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut pertimbangan Pengadilan;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan penggugat asli telah diajukan eksepsi oleh tergugat-tergugat asli yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa surat kuasa penggugat asli bukan surat kuasa yang memenuhi prosedur yang berlaku di Pengadilan Negeri karena didalamnya tidak menyebutkan tentang apa yang dipersengketakan;

bahwa gugatan didasarkan atas Akte Jual Beli No.557/I.7/11.1.1980 (bukti P-1) sehingga karena tergugat-tergugat asli tidak tercantum dalam akte sebagai pihak melainkan antara Sdr. Sani bin Saari sebagai pihak penjual dan penggugat asli sebagai pihak pembeli, maka oleh karena itu gugatan penggugat asli adalah salah arah;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 7 Agustus 1982 No.123/JS/1982 G., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

Menyatakan para tergugat telah ingkar janji;
Menyatakan penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 200 M² diatas persil No.104a, Nomor Kohir C. 303 Blok D. III yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berikut bangunan rumah tinggal yang ada diatasnya;
Memerintahkan para tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat tanah dan bangunan tersebut diatas dalam keadaan kosong dan bebas dari beban-beban yang ada diatasnya;
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut diatas;
Menghukum para tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 65.100,- (enam puluh lima ribu seratus rupiah);
Menolak gugatan selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 28 Mei 1983 No.75/1983 P.T. Perdata;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para tergugat-pembanding pada tanggal 28 September 1983 kemudian terhadapnya oleh tergugat I-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Oktober 1983 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.59/Kas/83/Pdt/123/JS/1982 G./PN.Jak.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana dengan disertai oleh memori alasan-alasannya yang ditanda tangani oleh kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 1983 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Oktober 1983 itu juga;

bahwa setelah itu oleh penggugat-terbanding yang pada tanggal 27 Oktober 1983 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat I-pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Nopember 1983;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49(4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara

kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa tergugat asal I (pemohon kasasi) dan tergugat asal II yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1982 telah mengajukan dalam eksepsinya bahwa kuasa penggugat asal (termohon kasasi) adalah berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Maret 1982, surat kuasa mana bukanlah surat kuasa khusus yang berlaku di Pengadilan karena dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan tentang apa yang dipersengketakan (tidak menyebutkan untuk apa dan mengenai apa kuasa diberikan);
2. bahwa judex facti mempertimbangkan bahwa tidak ikut sertanya pemilik tanah (Sani bin Saari) selaku penjual sebagai tergugat atau ikut tergugat adalah tidak imperatif (perlu).
Pertimbangan tersebut adalah tidak benar karena dalam akte jual beli (bukti P-1) jelas membuktikan bahwa Sdr. Sani bin Saari adalah selaku pemilik dan ia selaku pihak penjual harus digugat atau turut digugat. Dan kesaksian dari Sani bin Saari membuktikan pula bahwa tidak terjadi jual beli antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi melainkan hanya membenarkan bahwa ia sudah menjual tanah kepada termohon kasasi karenanya pemohon kasasi tidak merupakan pihak dalam sengketa ini dan oleh karena itu pula gugatan adalah salah alamat;
3. bahwa sita jaminan dalam perkara ini adalah menyimpang dari pro-

sedur karena hal itu tidak tercantum dalam petitum gugatan melainkan dengan surat tertanggal 15 Juli 1982 jauh sesudah gugatan diajukan.

Dan dengan dikabulkannya sita tersebut maka judex facti telah mengabulkan lebih dari apa yang dituntut, hal mana bertentangan dengan pasal 178 HIR;

Menimbang:

mengenai keberatan ad.1:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena sesuai dengan surat kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Juli 1982 dapat diambil kesimpulan: surat kuasa tersebut diperbuat tanggal 12 Mei 1982;

gugatan diajukan tanggal 18 Mei 1982;

dan jelas dalam surat kuasa itu dijelaskan obyek sengketa juga disebut pihak yang digugat.

Dengan demikian surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat syahnya sebagai surat kuasa khusus;

mengenai keberatan ad.2:

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena ternyata menurut surat-surat bukti jelas bahwa Sani bin Saari adalah pemilik dan selaku pihak penjual atas tanah sengketa. Oleh karena itu Sani bin Saari harus dijadikan tergugat utama. Dengan demikian dengan tidak digugatnya Sani bin Saari dalam perkara ini maka gugatan penggugat tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

mengenai keberatan ad.3:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah mencrapkan hukum.

Tentang conservatoir beslag dapat diminta sepanjang persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada ad.2 tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: Ny. Tati Suhartati tersebut dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Mei 1983 No.75/1983 P.T. Perdata dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Agustus 1982 No.123/JS/1982 G., sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini termohon kasasi/penggugat asal sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya per-

kara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Ny. Tati Suhartati tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Mei 1983 No.75/1983/P.T. Perdata dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Agustus 1982 No.123/JS/1982 G.;

Mengadili sendiri:

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Syarlinda Malik, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Agustus 1982 No.123/JS/1982. adalah tidak syah dan tidak berharga, oleh karena itu harus diangkat;

Menghukum termohon kasasi penggugat asal untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 1985 dengan Mohamad Yahya Adiwimarta SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Kohar Hari Soemarno SH dan M. Yahya Harahap SH, sebagai Hakim-hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 1985 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh M. Yahya Harahap SH dan Kohar Hari Soemarno SH, Hakim-hakim Anggauta, dan Soedjono SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara:

1. *Ny. Suhartati.*

2. *Moch. Sarwani Nur*, kedua-duanya bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Barat Rt.012/Rw.02, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya: HJC. Princen, Advokat & Pengacara, Jalan Menteng Kecil No.10, Jakarta Pusat.

Pembanding I dan II dahulu tergugat I dan II.

lawan

Pendapotan Hutajulu, bertempat tinggal di Komplek Anggaran Jalan Duren Tiga No.59, Jakarta Selatan;

Pembanding dahulu penggugat,

Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Tentang duduknya perkara:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Agustus 1982 No.123/JS/1982 G. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

Menyatakan para tergugat telah ingkar janji;

Menyatakan penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 200 M² diatas persil No.104 a, Nomor kohir C. 303 Blok D.III yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berikut bangunan rumah tinggal yang ada diatasnya;

Memerintahkan para tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat tanah dan bangunan tersebut diatas dalam keadaan kosong dan bebas dari beban-beban yang ada diatasnya;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan ter-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan yang berikut dalam perkara antara:

Pandapotan Hutajulu, bertempat tinggal di Komplek Anggaran Jl. Duren Tiga No.59 Jakarta Selatan, dalam hal ini dikuasakan oleh Ny. Hermida Manurung, bertempat tinggal di Komplek Anggaran Jl. Duren Tiga No.59 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai penggugat

Lawan

1. *Ny. Tati Suhartati*

2. *Moch Sarwani Nur*, kedua-duanya bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Barat Rt.012/Rw.02. Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domicile di kantor Kuasanya: HJC. Princen, Advokat dan Pengacara Jl. Menteng Kecil No.10 Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai para tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksinya.

Tentang duduknya perkara.

Menimbang, bahwa bunyi surat gugatan penggugat yang diajukan oleh kuasanya bernama: Ny. Hermida Manurung (berdasarkan surat kuasa khusus terlampir) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1980, tergugat I dan tergugat II telah menjual kepada penggugat sebidang tanah yang mereka akui sebagai miliknya, yakni atas sebidang tanah seluas 200 M² diatas persil No.104a, Nomor Kohir C.303 blok D.III yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang ada diatasnya, dengan harga Rp. 2.000.000,— (dua juta rupiah) sesuai Akte Jual Beli No.577/I.7/11.1/1980 tertanggal 26 Maret 1980 (P-1, P-2);

2. Bahwa walaupun secara resmi para tergugat telah menjual tanah dan

rumahnya kepada penggugat dan penggugat telah pula membayar lunas harganya, namun hingga saat ini ternyata para tergugat sebagai belum mau menyerahkan tanah dan bangunan rumah tersebut kepada penggugat, karenanya terbukti bahwa para tergugat telah ingkar janji;

3. Bahwa para tergugat telah penggugat peringatkan berulang kali, supaya segera mengosongkan tanah dan bangunan rumah yang sudah menjadi haknya penggugat tersebut, namun para tergugat sebagai enggan untuk memenuhi peringatannya penggugat tersebut, karenanya penggugat telah melaporkan ulahnya para tergugat tersebut kepada pihak yang berwenang dan dalam hal ini Lurah Kelurahan Tanjung Barat dan Camat Kecamatan Pasar Minggu, namun para tergugat sebagai membangkang perintah untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah tersebut;

4. Bahwa tergugat II telah pula melakukan tindakan yang kurang terpuji yaitu bahwa tergugat II telah memberikan laporannya kepada POM ABRI yang meperangkan seakan-akan untuk pengosongan tanah dan rumah tersebut penggugat sebagai memperlalat ABRI, sehingga dengan laporannya itu maka penggugat telah dipanggil dan diperiksa POM ABRI, namun ternyata bahwa laporannya tergugat II tersebut sebagai tidak berdasarkan sama sekali;

5. Bahwa karena penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah yang telah dijual oleh para tergugat tersebut penggugat sebagai enggan untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah tersebut kepada penggugat, maka penggugat mohon agar Pengadilan memerintahkan para tergugat segera menyerahkan tanah dan bangunan rumah tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban-beban yang ada di atasnya;

6. Bahwa karena ulahnya para tergugat yang enggan menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang telah dijualnya kepada penggugat tersebut, maka penggugat sebagai sangat dirugikan baik moril maupun materiel, karenanya penggugat mempunyai hak menurut hukum untuk menuntut ganti rugi kepada para tergugat;

7. Bahwa besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat, apabila dinilai dengan uang maka keseluruhannya berjumlah: Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat diperinci sebagai berikut:

a. Biaya untuk kontrak rumah yang sekarang ditempati penggugat selama 3 (tiga) tahun a Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setahun = Rp. 1.200.000,-

b. Biaya mundar mandir dan biaya lainnya yang dikeluarkan penggugat untuk urusan ke kantor Kelurahan, kekantor Kecamatan dan Pom-

ABRI, keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 300.000,—

8. Bahwa karena ada kekhawatiran, yang kuat, para tergugat sebagai enggan untuk memberikan ganti rugi kepada penggugat maka penggugat memohon kepada Pengadilan agar harta kekayaannya para tergugat berupa sebidang tanah seluas 200 M² girik No.C.303 berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya yang terletak di Tanjung Barat Rt.0012/02 Kel. Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dikenakan sita jaminan;

9. Bahwa penggugat mempunyai dasar hukum yang kuat untuk memohon kepada Pengadilan, agar putusan mengenai perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memutuskan:

I. Dalam Provisi:

1. Memerintahkan para tergugat agar segera mengosongkan tanah dan bangunan rumah yang masih didudukinya, selanjutnya diserahkan kepada penggugat, supaya tidak dialihkan disewakan kepada pihak ketiga, sampai adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde);
2. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) dengan seketika dan secara tunai kepada penggugat sebesar Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila putusan provisionil ini dilanggar;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah ingkar janji;
3. Menyatakan para tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan penggugat sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 200 M² diatas persil No.104a: Nomor Kohir C.303 blok D.III yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya;
5. Memerintahkan para tergugat segera melaksanakan isi Akte Jual Beli No.577/I.7/11.1/1980 tertanggal 26 Maret 1980 yang dibuat Camat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, yaitu dengan menyerahkan

- kan kepada penggugat sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dalam keadaan kosong dan bebas dari beban-beban yang ada di atasnya;
6. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah seluas 200 M² girik No. C.303 berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya yang terletak di Tanjung Barat 0012/02 Kel. Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
 8. Memerintahkan para tergugat agar melaksanakan putusan perkara ini selambat-lambatnya dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak putusan mengenai perkara ini dibacakan;
 9. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
 10. Menetapkan putusan mengenai perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau pun kasasi;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut pertimbangan Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Ketua Majelis akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai;

Menimbang, bahwa sebagai kuasa untuk kepentingan tergugat I dan II telah bertindak sebagai kuasa Sdr. HJC. Princen (berdasarkan surat kuasa khusus No.29/PA/VI/1982 tertanggal Jakarta, 29 Juni 1982);

Menimbang, bahwa para tergugat dalam jawabannya tertanggal 15 Juli 1982 pada pokoknya menerangkan:

Dalam Eksepsi:

Bahwa surat kuasa penggugat adalah bukan surat kuasa khusus; kedua, bahwa gugatan adalah salah arah oleh karena para tergugat tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini;

Dalam Propisi:

Keberatan terhadap tuntutan pengosongan tanah dan bangunan rumah serta uang paksa, dengan alasan bahwa hal ini adalah menyangkut pokok perkara yang tidak dapat diputus dengan propisi;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak seluruh dalil-dalil penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung peristiwa-peristiwa seperti dengan jelas diterangkan dalam berita acara pemeriksaan